

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa jabatan fungsional baru, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
7. Pejabat Administrator adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pejabat Fungsional yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 27 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38
 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
1	Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri
2	Analisis Kebakaran	
3	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
4	Pemadam Kebakaran	
5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
6	Polisi Pamong Praja	
7	Penata Perizinan	
8	Analisis Hukum	Kementerian Hukum
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
10	Penata Kelola Penanaman Modal	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
11	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan
12	Apoteker	
13	Asisten Apoteker	
14	Asisten Penata Anestesi	
15	Bidan	
16	Dokter	
17	Dokter Gigi	
18	Entomolog Kesehatan	
19	Epidemiolog Kesehatan	
20	Fisikawan Medis	
21	Fisioterapis	
22	Nutrisionis	
23	Okupasi Terapis	
24	Pembimbing Kesehatan Kerja	
25	Penata Anestesi	
26	Perawat	
27	Perekam Medis	
28	Pranata Laboratorium Kesehatan	
29	Psikolog Klinis	
30	Radiografer	
31	Refraksionis Optisien	
32	Teknisi Elektromedis	
33	Teknisi Gigi	
34	Terapis Gigi dan Mulut	
35	Teknisi Transfusi Darah	
36	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	
37	Tenaga Sanitasi Lingkungan	
38	Terapis Wicara	
39	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan
40	Mediator Hubungan Industrial	
41	Pengantar Kerja	
42	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan
43	Analisis Keuangan Negara	

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
44	Pengawas Keuangan Negara	
45	Penilai	
46	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Digital
47	Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
48	Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
49	Pengembang Kewirausahaan	
50	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
51	Pengendali Dampak Lingkungan	
52	Penyuluh Lingkungan Hidup	
53	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
54	Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
55	Penata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
56	Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum
57	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	
58	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	
59	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	
60	Penata Laksana Jalan dan Jembatan	
61	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	
62	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	
63	Pengelola Sumber Daya Air	
64	Penata Laksana Sumber Daya Air	
65	Penata Kelola Perumahan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
66	Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
67	Guru	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
68	Penilik	
69	Pamong Belajar	
70	Pengawas Sekolah	
71	Pamong Budaya	
72	Analisis Perdagangan	Kementerian Perdagangan
73	Penera	
74	Pengamat Tera	
75	Pengawas Perdagangan	
76	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan
77	Pembina Industri	Kementerian Perindustrian
78	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	
79	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian
80	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
81	Medik Veteriner	
82	Paramedik Veteriner	
83	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
84	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	
85	Pengawas Mutu Pakan	
86	Pengawas Bibit Ternak	
87	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
88	Analisis Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
89	Teknisi Akuakultur	
90	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
91	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
92	Analisis Pasar Hasil Perikanan	
93	Asisten Pengawas Perikanan	
94	Pengawas Perikanan	
95	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial
96	Penyuluh Sosial	
97	Arsiparis	Arsip Nasional (ANRI)
98	Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial (BIG)
99	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
100	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	
101	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
102	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
103	Analisis Kebencanaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
104	Penata Penanggulangan Bencana	
105	Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
106	Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
107	Sandiman	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
108	Manggala Informatika	
109	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik (BPS)
110	Statistisi	
111	Peneliti	Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN)
112	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
113	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	
114	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
115	Pustakawan	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
116	Asisten Perpustakaan	
117	Perisalah Legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI
118	Asisten Perisalah Legislatif	
119	Penerjemah	Sekretariat Kabinet

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002